

THE DIGITAL REPOSITORY

PERANAN GABUNGAN POLITIK INDONESIA (GAPI)
DALAM PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA

SKRIPSI



Oleh :

Hariyanto

NIM : 9402105299

Atas :	Hadiah	Klasifikasi
	Pembelian	
Terima Tel:	02 OCT 1999	320.5
No. Induk :	PTI '99 2420	Her Ten

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER

AGUSTUS, 1999

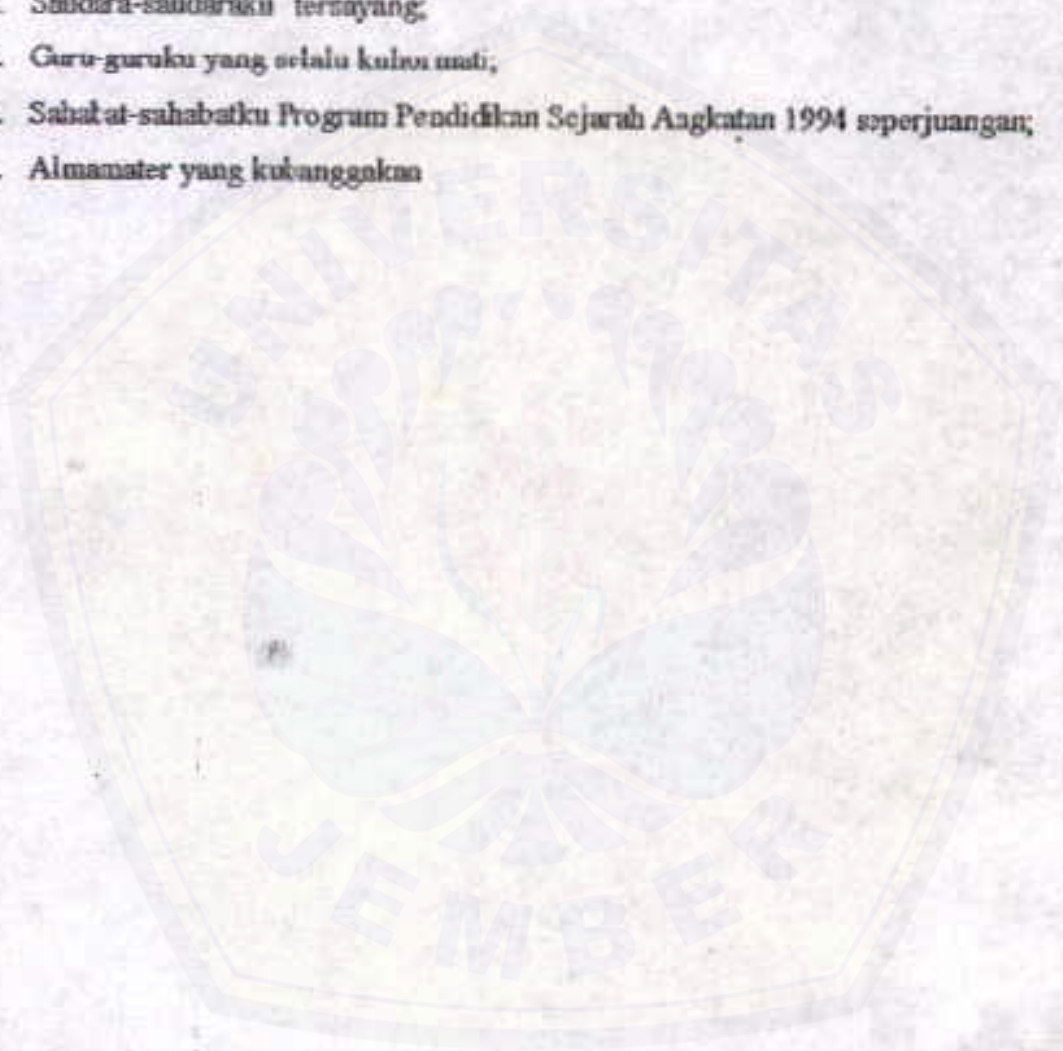
Motto :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ
عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (سورة النور: ١٠٣)

Artinya : "Dan berpeganglah kamu sekalian kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah (yang diberikannya) kepadamu, ketika kamu telah bermusuhan, lalu telah dipersatukan-Nya hatimu, sehingga kamu jadi bersaudara dengan rahmat-Nya, dan adalah kamu di atas pinggir lubang neraka, lalu Allah melepaskan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu mudah-mudahan kamu menerima petunjuk" (Q.S. Ali 'Imran:103, dalam Mahmud Junus, 1996:58).

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Ayah dan ibu yang telah memberikan dorongan spiritual dan materiil demi keberhasilanku;
2. Saudara-saudaraku tersayang;
3. Guru-guruku yang selalu kulola mati;
4. Sahabat-sahabatku Program Pendidikan Sejarah Angkatan 1994 seperjuangan;
5. Almamater yang kukanggakan



PERANAN GABUNGAN POLITIK INDONESIA (GAPI)
DALAM PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk dipertahankan di depan Tim Penguj, guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Spesialisasi Program Pendidikan Sejarah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas Jember.

Oleh :

Nama Mahasiswa : HARIYANTO
N I M : 9402105299
Angkatan Tahun : 1994
Daerah Asal : Jember
Tempat / Tanggal Lahir : Jember, 28 September 1975
Jurusan / Program : Pend. IPS / Pend. Sejarah

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



DRS. H. CHOESNOEL HADI
NIP. 130 145 576

Pembimbing II,



DRA. NURUL UMAMAH
NIP. 132 052 408

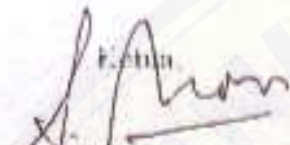
telah dipertahankan di depan Tim penguji dan diterima oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas Jember sebagai skripsi,

Pada hari : Jumat

Tanggal : 27 Agustus 1999

Tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas Jember

Tim Penguji

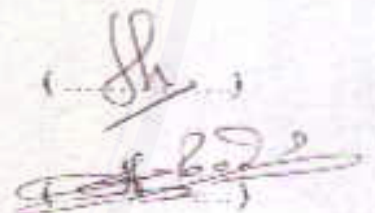

Drs. SUMARNO
NIP. 131 403 352

Sekretaris,

DRA. NURUL UMAMAH
NIP. 132 052 408

Anggota

1. DRA. SRI HANDAYANI
NIP. 131 274 786
2. DRS. H. CHOESNOEL HADI
NIP. 130 145 576




Mengetahui
Dekan,

Drs. SOELARDJO BW
NIP. 130 287 101

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Peranan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) Dalam Pergerakan Nasional Indonesia."

Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Jember,
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas Jember,
3. Kepala UPT Perpustakaan Universitas Jember,
4. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas Jember,
5. Ketua Program Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Universitas Jember,
6. Dosen Pembimbing I dan II,
7. Semua dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas Jember,
8. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini,

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif demi lebih baiknya skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu sejarah. Amin.

Jember, 27 Agustus 1999

Penulis

RINGKASAN

HARIYANTO, Agustus 1999, *Peranan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) Dalam Pergerakan Nasional Indonesia*, Skripsi, Program Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Universitas Jember.

Pembimbing : (I) Drs. H. Choesoel Hadi
(II) Dra. Nurul Umanah

Kata Kunci : (1) Peranan GAPI, (2) Pergerakan Nasional Indonesia

Gabungan Politik Indonesia (GAPI) berdiri tidak terlepas dari adanya kegagalan petisi Soetardjo. Setelah petisi Soetardjo ditolak oleh Negeri Belanda, maka kaum pergerakan nasional berusaha membentuk Badan Konsentrasi Nasional. Pada rapat pendirian Badan Konsentrasi Nasional di Jakarta tanggal 21 Mei 1939, berhasil didirikan suatu organisasi yang merupakan kerjasama dari partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa yang diberi nama Gabungan Politik Indonesia (GAPI). GAPI mempunyai peranan yang sangat besar dalam pergerakan nasional Indonesia. Peranan GAPI terlihat dalam aktivitasnya dalam pergerakan nasional Indonesia. Hal itu sangat menarik untuk ditelaah lebih mendalam, karena dengan mengetahui usaha GAPI dalam menyatukan dan bekerja sama antara organisasi-organisasi politik guna melawan kolonialisme Belanda, maka akan memberikan semangat persatuan dan kesatuan bagi generasi penerus perjuangan bangsa, sehingga dapat bermanfaat dalam membentuk semangat nasionalisme.

Fermasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: "Bagaimanakah peranan GAPI dalam pergerakan nasional Indonesia?"

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui secara jelas dan mendalam mengenai kegiatan atau aktivitas GAPI dalam pergerakan nasional Indonesia. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: (1) bagi penulis, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan mendapat pengalaman dalam rangka pengembangan ilmu serta memperluas wawasan pengetahuan sejarah, terutama yang berhubungan dengan peranan GAPI dalam pergerakan nasional Indonesia, (2) bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat memberi masukan dan tambahan pengetahuan guna memperdalam materi sejarah pergerakan nasional Indonesia. Dalam hal ini sangat penting karena termasuk salah satu dari sepuluh kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh seorang calon guru, khususnya kemampuan dasar tentang penguasaan materi, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme sebagai guru sejarah sekaligus peneliti sejarah, (3) bagi generasi muda, dapat memberikan semangat persatuan dan kesatuan dalam membela kepentingan bangsa dan negara, sehingga dapat membentuk semangat nasionalisme, (4) bagi almamater, merupakan salah satu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu dharma penelitian, selanjutnya hasil penelitian ini akan menambah khasanah kepustakaan di UPT Perpustakaan - Universitas Jember, khususnya tentang ilmu sejarah pergerakan nasional Indonesia.



Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 1999, dengan studi literatur sehingga tempat penelitiannya adalah perpustakaan. Metode penentuan tempat penelitian yang digunakan adalah purposive sampling. Perpustakaan yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah UPT Perpustakaan - Universitas Jember, Perpustakaan FKIP - Universitas Jember, dan Perpustakaan Program Pendidikan Sejarah FKIP - Universitas Jember. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian sejarah, dengan langkah heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumenter dan metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode filosofik dengan teknik logika komparatif dan teknik logika induktif.

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan permasalahan pada bab I dan pembahasan pada bab IV adalah peranan GAPI dalam pergerakan nasional Indonesia dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas GAPI, yaitu (1) aktivitas GAPI dalam menuntut Indonesia berparlemen, (2) aktivitas GAPI dalam pergerakan nasional Indonesia dalam membentuk Kongres Rakyat Indonesia (KRI) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan merubah Kongres Rakyat Indonesia (KRI) menjadi Majelis Rakyat Indonesia (MRI) sebagai badan untuk mengimbangi Dewan Rakyat. Semua aksi dan aktivitas GAPI itu memberikan semangat baru bagi pergerakan nasional Indonesia, walaupun bila dilihat secara keseluruhan belum berhasil mencapai cita-cita akhir pergerakan nasional Indonesia, yaitu Indonesia merdeka.

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan kesimpulan tersebut adalah: (1) bagi mahasiswa calon guru sejarah, hendaknya lebih banyak membaca literatur tentang Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, sehingga dapat menambah wawasan dan memperdalam penguasaan materi, (2) bagi generasi muda, belajar sejarah adalah sangat penting bagi kaum muda karena masa depan bangsa terletak pada generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa. Dengan mengerti sejarah Pergerakan nasional Indonesia, khususnya peranan GAPI dalam pergerakan nasional Indonesia maka akan terbentuk semangat nasionalisme generasi muda dan memberikan semangat persatuan dan kesatuan dalam membela kepentingan bangsa dan negara, (3) bagi ahimater, hendaknya menambah literatur-literatur yang berkaitan dengan Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, untuk memperkaya kepustakaan hasil penelitian dari ahli-ahli sendiri maupun ahli-ahli asing, demi pengembangan ilmu sejarah nasional.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
RINGKASAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang Pemilihan Permasalahan.....	1
1.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	4
1.3 Ruang Lingkup Dan Rumusan Permasalahan.....	7
1.3.1 Ruang Lingkup Permasalahan.....	7
1.3.2 Rumusan Permasalahan.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Riwayat Singkat Berdirinya GAPI.....	10
2.2 Peranan GAPI Dalam Pergerakan Nasional Indonesia	11
2.2.1 Aktivitas GAPI Dalam Menuntut Indonesia	
Berparlemen.....	12
2.2.2 Aktivitas GAPI Dalam Pergerakan Nasional	
Indonesia.....	14

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pengertian Metode Penelitian	19
3.2 Metode Penelitian Sejarah.....	20
3.2.1 Heuristik.....	21
3.2.2 Kritik	21
3.2.3 Interpretasi.....	22
3.2.4 Historiografi	22
3.3 Metode Penentuan Tempat Penelitian.....	23
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	25
3.5 Metode Analisis Data.....	25
3.5.1 Teknik Logika Induktif.....	26
3.5.2 Teknik Logika Komparatif.....	26

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Riwayat Singkat Berdirinya GAPI.....	28
4.1.1 Latar Belakang Berdirinya GAPI.....	28
4.1.2 Berdirinya GAPI.....	32
4.2 Peranan GAPI Dalam Pergerakan Nasional Indonesia.....	37
4.2.1 Aktivitas GAPI Dalam Menuntut Indonesia Berparlemen	37
4.2.2 Aktivitas GAPI Dalam Pergerakan Nasional Indonesia.....	43
4.2.2.1 Pembentukan Kongres Rakyat Indonesia (KRI).....	43
4.2.2.2 Pembentukan Majelis Rakyat Indonesia (MRI).....	47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran-saran	52

KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik Penelitian
2. Surat keterangan ijin studi literatur dari Kepala UPT
Perpustakaan-Universitas Jember

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RALAT

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Permasalahan

Memasuki abad XX dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai periode kebangkitan nasional, pertumbuhan kesadaran nasional yang menjiwai proses itu melalui langkah - langkah yang wajar yaitu dengan adanya ide emansipasi dari status yang serba terbelakang menuju kearah pertumbuhan di segala aspek kehidupan salah satunya mengenai bidang politik. Perjuangan yang dilakukan kaum pergerakan nasional mempunyai tujuan utama yaitu untuk memperjuangkan kehidupan dalam mencapai negara yang merdeka dan bebas dari tekanan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda (Sartono kartodirdjo, 1990: 120).

Kekuasaan tertinggi di Indonesia antara tahun 1931 - 1936 dipegang oleh Gubernur Jendral Bonafacus Cornelis de Jonge yang bersikap keras dan reaksioner terhadap semua pergerakan nasional (D.M.G. Koch, 1951: 114). Gubernur de Jonge dalam menjalankan tugasnya telah membuat pergerakan nasional tidak dapat menjalankan aksinya, terutama pergerakan yang bersikap non kooperatif, karena dianggap tidak bisa diajak bekerja sama dan gerakannya dilakukan dengan mengorganisir massa untuk melawan pemerintah kolonial. Melihat sikap non kooperatif yang dijalankan oleh kaum pergerakan tersebut, maka pemerintah kolonial menganggapnya sebagai musuh yang dapat mengganggu stabilitas keamanan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Akibat adanya tekanan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah kolonial, maka partai-partai politik yang non kooperatif tidak dapat berkembang dengan baik.

Berdasarkan keadaan pergerakan nasional yang semakin tertekan serta menghadapi kesulitan dengan adanya penindasan yang dilakukan pemerintah kolonial, maka diperlukan taktik perjuangan yaitu dengan taktik kooperatif, hal ini dikarenakan taktik non kooperatif selalu mengalami kegagalan dalam perjuangan (Ahmad Subardjo Djoyoadisurjo, 1978: 226). Karena itu antara tahun 1935 - 1942 partai politik di Indonesia tidak memobilisasi massa tetapi bergerak

secara parlemen melalui Dewan Rakyat dan bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda (tersebut kooperatif).

Salah satu langkah baru dalam pergerakan nasional dilakukan lewat perjuangan di Parlemen atau Dewan Rakyat adalah dengan munculnya petisi Soetardjo pada tanggal 15 Juli 1936. Soetardjo kartohadikusumo adalah seorang wakil dari Peratuan Pegawai Bestuur Bumipotera (PPDB) yang duduk dalam Dewan Rakyat. Ia mengusulkan pada Dewan Rakyat agar diadakan konferensi antara Indonesia dengan pihak Belanda untuk rencana persiapan kemerdekaan dalam waktu sepuluh tahun atau dalam waktu yang ditentukan dalam konferensi (Iwa Kusuma Sunantri, 1963: 73). Tetapi usul itu ditolak dengan alasan bahwa tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik bangsa Indonesia belum memadai untuk menjalankan pemerintahan sendiri (Anhar Gonggong, 1985: 45).

Setelah petisi Soetardjo mengalami kegagalan maka melalui Moh. Hoesni Thaurin sebagai ketua dari Partai Indonesia Raya (PARINDRA) memprakarsai untuk menggalang Badan Konsentrasi Nasional, ide tersebut dikemukakan dalam rapat pengurus besar PARINDRA pada tanggal 19 Maret 1939 (Slamet Mulyana, 1986: 64). Kemudian Moh. Hoesni Thaurin mengadakan pendekatan dan perundingan dengan partai-partai dan organisasi-organisasi seperti Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Gerakan Rakyat Indonesia (GERINDO), Partai Islam Indonesia (PII), Pasundan, Peratuan Minahasa, dan Partai Katholik untuk membicarakan masa depan Indonesia. Pada tanggal 21 Mei 1939 dalam rapat pendirian Konsentrasi Nasional di Jakarta bertumbuhlah didirikan suatu organisasi yang merupakan kerjasama dari partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa yang diberi nama Gabungan Politik Indonesia (GAPI). GAPI merupakan federasi dari organisasi-organisasi massa dan partai-partai politik, bentuk federasi dimaksudkan agar mencerminkan situasi sosial dan politik di Indonesia pada saat itu yang terdapat berbagai aliran organisasi. Mengingat berbagai aliran organisasi itu memiliki ciri dan eksistensi masing-masing, maka federasi dibuat lebih longgar dan tidak lebur, sehingga organisasi-organisasi tetap mempunyai kebebasan penuh

terhadap program kerjanya masing-masing. Yang penting bagaimana organisasi-organisasi itu dapat bersatu dan bekerja sama dalam satu wadah untuk melawan Belanda. Di dalam konferensi pertama GAPI pada tanggal 4 Juli 1939 telah dibicarakan gerakan GAPI dengan semboyan "Indonesia Berparlemen" yang menuntut suatu parlemen yang berdasarkan sendi - sendi demokrasi (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, 1992 : 231-232).

Peranan GAPI dalam pergerakan nasional Indonesia terlihat dengan membentuk sebuah Kongres Rakyat Indonesia (KRI) pada tanggal 24 Desember 1935 yang bertujuan untuk membahagiakan dan mensentosakan rakyat. Aktivitas GAPI selanjutnya dalam KRI adalah diadakan kongres-kongres dan dalam kongres-kongres tersebut tujuan utamanya adalah memperjuangkan Indonesia Berparlemen (Suhartono, 1994 : 95). Untuk memperluas jangkauan perjuangannya GAPI membentuk Komite Parlemen Indonesia di seluruh Indonesia, dianjurkan di daerah-daerah mengadakan kursus-kursus dan rapat-rapat baik tertutup maupun umum. Pada bulan Agustus 1940 GAPI menuntut diadakannya perubahan ketatanegaraan di Indonesia, yaitu menuntut penggantian Volksraad menjadi parlemen sejati yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat. Untuk menanggapi tuntutan GAPI, maka pemerintah Belanda membentuk komisi Visman pada tanggal 14 September 1940. GAPI tidak menyetujui dibentuknya komisi Visman karena pengalaman komisi yang sejenis pernah dibentuk tahun 1918 yang ternyata tidak menghasilkan apa-apa (Marwati Djoened Pusponegoro dan Nugroho Notokusanto, 1992 : 233-234).

Aktivitas GAPI dalam Pergerakan nasional Indonesia lebih ditingkatkan lagi dengan merubah nama Kongres Rakyat Indonesia (KRI) menjadi Majelis Rakyat Indonesia (MRI) dalam konferensinya di Yogyakarta Pada tanggal 14 September 1941. Usaha pembentukan MRI tersebut dipelopori oleh GAPI, Majelis Islam A'la Indonesia (MLAI) dan Persatuan Vokbonden Pegawai Negeri (PVPN) (A.K. Pringgodigdo, 1994 : 150).

Jadi jelas, aktivitas GAPI dalam membentuk KRI dan MRI mempunyai peranan yang sangat besar dalam pergerakan nasional Indonesia. Hal itu sangat

menarik untuk ditelaah lebih mendalam, karena dengan mengetahui usaha GAPI dalam menyatukan dan bekerja sama antara organisasi-organisasi politik guna melawan kolonial Belanda, maka akan bermanfaat bagi pembentukan nasionalisme generasi pada masa sekarang.

Selain faktor kemenarikan seperti yang dikemukakan di atas, pemilihan permasalahan ini juga didasarkan atas pendapat Sutrisno Hadi yang menyatakan: (1) topik masih dalam jangkauan peneliti, (2) terdapatnya sumber-sumber (data-data), (3) topik cukup penting untuk diteliti (1985:51). Alasan lain topik belum pernah diteliti oleh mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di lingkungan Universitas Jember serta adanya kesediaan dari dosen pembimbing dalam membimbing penulis dalam penelitian ini. Alasan lain yang juga perlu penulis kemukakan, yaitu bahwa sebagai calon guru sejarah yang profesional, dipersyaratkan menguasai sepuluh kemampuan dasar guru, terutama kemampuan dasar tentang penguasaan materi. Dengan meneliti atau mengkaji peranan GAPI dalam pergerakan nasional Indonesia, maka penguasaan materi mengenai sejarah pergerakan nasional Indonesia akan tercapai.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penulis memilih permasalahan yang dirumuskan dalam kalimat judul "Peranan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) Dalam Pergerakan Nasional Indonesia."

1.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Guna menghindari perbedaan penafsiran terhadap judul penelitian ini, maka perlu penulis jelaskan pengertian masing-masing variabelnya. Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini adalah (1) Peranan Gabungan Politik Indonesia(GAPI), (2) Pergerakan Nasional Indonesia

1.2.1 Peranan Gabungan Politik Indonesia (GAPI)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (1991: 751). Peranan Menurut Mely. G. Tan dalam Koentjaraningrat (Red) adalah perilaku seseorang dalam

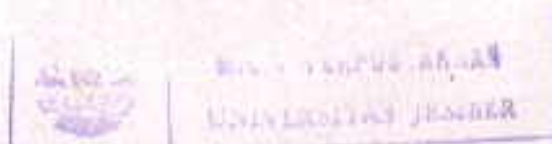
kedudukan tertentu (1977: 47). Perilaku seseorang yang dimaksud adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh GAPI, sedangkan kedudukan tertentu maksudnya ialah kedudukan atau fungsi GAPI dalam pergerakan nasional Indonesia.

GAPI adalah Suatu Gabungan dari organisasi-organisasi politik di Indonesia, didirikan pada tanggal 21 Mei 1939 (P.M. Pasaribu, 1960: 224). Menurut Susanto Tirtoprodjo, GAPI merupakan federasi dari organisasi-organisasi politik di Indonesia untuk meagalang persatuan nasional, yang masuk didalamnya adalah PARINDRA, GERINDO, Pasundan, Persatuan Miahasa, PSII, PI. GAPI terkonal dengan tuntutannya "Indonesia Berparlemen" (1986: 67). Federasi yang dimaksud disini dibuat lebih longgar dan tidak lebur, jadi utara organisasi-organisasi yang tergabung tidak lebur menjadi satu, akan tetapi organisasi-organisasi tersebut masih memiliki identitas, eksistensi dan kebebasan penuh dalam menjalankan program kerjanya masing-masing. GAPI merupakan organisasi federasi yang cukup besar dan mampu menyatukan berbagai organisasi politik yang ada, baik yang bersifat nasionalis sekuler maupun organisasi dari kalangan agama, dengan demikian GAPI merupakan wadah gabungan yang cukup kuat dan menyeluruh.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan peranan GAPI adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh organisasi-organisasi dan partai-partai politik di Indonesia yang tergabung dalam GAPI guna menuntut "Indonesia Berparlemen" pada pemerintah kolonial Belanda.

1.2.2 Pergerakan Nasional Indonesia

Pergerakan adalah suatu kegiatan untuk berjuang mencapai cita-cita nasional (Hugo F. Reading, 1986: 79). Pergerakan menurut A. K. Pringgodigdo meliputi segala macam kegiatan yang dilakukan dengan organisasi secara modern kearah perbaikan hidup, karena tidak puasnya dengan keadaan masyarakat yang ada (1994:VI). Menurut C.S.T. Kansil dan Julianto pergerakan mengandung pengertian yang khas berlainan dengan pengertian perjuangan, yang dimaksud



dengan pergerakan adalah geraknya suatu bangsa untuk mencapai kemerdekaan dengan menggunakan organisasi yang teratur (1987:15).

Kata nasional menurut Sartono Kartodirdjo adalah sebagai kata sifat dari "nation" yang berarti bangsa, digunakan dalam pengertian yang lebih luas yaitu menunjukkan kesatuan seluruh bangsa (1993:227). Kata nasional disini digunakan dengan maksud menunjukkan aktivitas dari pergerakan disegala lapangan kehidupan yang mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk berjuang melawan kekuasaan kolonial Belanda, jadi bersifat kebangsaan.

Menurut Suhartono penyebutan nama Indonesia dalam pergerakan nasional Indonesia berfungsi simbolis dan dalam sejarah pergerakan nasional tidak dengan sendirinya terjadi tetapi melalui proses yang cukup panjang dan dengan makin majunya pergerakan nasional sebutan "Indonesia" merupakan keharusan. Dengan digunakannya sebutan itu berarti bahwa perkembangan nasionalisme Indonesia sudah menginjak fase baru yang lebih nyata (1994:4).

Awal mula timbulnya pergerakan nasional Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 dan diakhiri dengan tercapainya kemerdekaan nusa dan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 (Susanto Tirtoprodjo, 1986:7).

Dari pendapat-pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan Pergerakan Nasional Indonesia adalah kegiatan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia (walaupun yang bergerak tidak seluruh bangsa) melalui organisasi modern dalam melawan pemerintah kolonial untuk mencapai kemerdekaan.

Berdasarkan Pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan Peranan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) Dalam Pergerakan Nasional Indonesia adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh organisasi-organisasi dan partai-partai politik yang tergabung dalam GAPI guna menuntut "Indonesia Berparlemen" sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah kolonial Belanda walaupun belum sampai tujuan akhir untuk mencapai Indonesia merdeka.

1.3 Ruang Lingkup dan Rumusan Permasalahan

1.3.1 Ruang Lingkup

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari fokus permasalahan yang akan dibahas, maka penulis merasa perlu untuk membatasi ruang lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mely G. Tan dalam Koentjaraningrat (Red) yang mengatakan bahwa kalau masalah sudah terpilih, perlu ditentukan ruang lingkungannya, ini penting sekali supaya peneliti tidak terjerumus kedalam sekian banyaknya data yang akan diteliti (1991:17).

Berdasarkan pendapat di atas, maka penelitian ini mengambil ruang lingkup waktu atau temporal tahun 1939 – 1942, tahun 1939 dijadikan sebagai batas awal penelitian, karena pada tahun tersebut merupakan waktu berdirinya GAPI. Sedangkan tahun 1942 dijadikan sebagai batas akhir penelitian, karena merupakan akhir penemuan GAPI dalam pergerakan nasional Indonesia yang ditandai dengan bergantinya kekuasaan di Indonesia dari tangan Belanda ke tangan Jepang pada tahun 1942. Setelah Jepang berkuasa di Indonesia, semua organisasi politik yang pernah berkembang di zaman kolonial Belanda dibubarkan. Penulis tegaskan, bahwa ruang lingkup waktu tersebut tidak bersifat mengikat tetapi bersifat fleksibel, maksudnya dalam hal-hal tertentu penulis masih mengkaitkan dengan peristiwa-peristiwa lain baik sebelum tahun 1939 dan sesudah tahun 1942.

Mengenai ruang lingkup tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Jawa yang merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya organisasi GAPI, disamping itu digunakan scope nasional, hal ini dikarenakan topik permasalahan yang akan dibahas adalah merupakan pergerakan nasional yang artinya bahwa pergerakan seluruh bangsa Indonesia dan mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Sedangkan fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai kegiatan atau aktivitas GAPI dalam pergerakan nasional Indonesia karena tujuan yang diperjuangkan oleh GAPI adalah menuntut "Indonesia Berparlemen," jadi jelas tidak menginginkan kemerdekaan secara penuh, maka dalam skripsi ini

nanti tidak membahas sampai Indonesia mereka, tetapi khusus membahas mengenai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan GAPI dalam menuntut "Indonesia Berparlemen" dalam rangka pergerakan nasional Indonesia.

1.3.2 Rumusan Permasalahan

Setiap penelitian selalu bertitik tolak dari permasalahan, maka seorang peneliti perlu untuk merumuskan secara tegas permasalahan dalam rencana penelitiannya. Suharsimi Arikunto menjelaskan, bahwa rumusan permasalahan penelitian disebut juga ancer-ancer kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan (1989: 4). Menurut Winarno Surakhmad, Permasalahan merupakan hal yang pertama kali harus difikirkan sebelum suatu penelitian dilakukan (1989 : 33)

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah "bagaimanakah peranan GAPI dalam pergerakan nasional Indonesia." ?

Untuk membahas atau menjawab permasalahan tersebut di atas, penulis tidak merumuskan hipotesis secara eksplisit, dengan alasan: (1) penelitian semacam ini adalah bersifat deskriptif, yaitu memaparkan apa adanya dari berbagai aspek, (2) menurut Winarno Surakhmad, di dalam penelitian historik yang bersifat deskriptif, peneliti tidak harus merumuskan hipotesis penelitian secara eksplisit (1990:129).

1.4 Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah ingin mengungkapkan secara jelas dan mendalam mengenai kegiatan atau aktifitas GAPI dalam menuntut "Indonesia Berparlemen" dalam rangka pergerakan nasional Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. bagi penulis, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan mendapat pengalaman dalam rangka pengembangan ilmu serta memperluas wawasan pengetahuan sejarah, terutama yang berhubungan dengan peranan GAPI dalam pergerakan nasional Indonesia;
2. bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat memberi masukan dan tambahan pengetahuan guna memperdalam materi sejarah pergerakan nasional Indonesia. Dalam hal ini sangat penting karena termasuk salah satu dari sepuluh kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh seorang guru, khususnya kemampuan dasar tentang penguasaan materi, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme sebagai guru sejarah sekaligus peneliti sejarah;
3. bagi generasi muda, dapat memberikan semangat persatuan dan kesatuan, sehingga dapat membentuk semangat nasionalisme, demi perjuangan mencapai tujuan nasional;
4. bagi almamater, merupakan salah satu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu dharma penelitian, selanjutnya penelitian ini akan menambah khasanah kepastakaan di UPT Perpustakaan Universitas Jember, khususnya tentang ilmu sejarah pergerakan nasional Indonesia.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Riwayat Singkat Berdirinya GAPI

Pengangkatan Tjarda Van Starckenborg Stachouwer menjadi Gubernur Jendral di Indonesia menggantikan De Joung, mendorong pergerakan rakyat mendesak agar pemerintah mengadakan pembaharuan yang demokratis dalam pemerintahan. Tuntutan penting yang menghendaki pembaharuan itu ialah apa yang kemudian dikenal sebagai Petisi Soetardjo yang diajukan lewat dan dengan dukungan Volksraad Petisi yang di kemukakan pada tanggal 15 Juli 1936 oleh Soetardjo Kartohadikusumo sebagai wakil dari Persatuan Pegawai Bestuur Bumiputera (PPBB) yang duduk dalam Volksraad bersama 5 anggota Volksraad lainnya yaitu Kasimo, Ratulangi, Datuk Tumenggung, Alatas, dan Ko Kwat Tieng, mengusulkan supaya diadakan suatu sidang permusyawaratan dari wakil-wakil Belanda dan Indonesia atas dasar kesamaan kedudukan untuk menyusun rencana pemberian hak berdiri sendiri bagi bangsa Indonesia, yang pelaksanaannya bertahap dalam waktu 10 tahun atau dalam waktu yang ditentukan dalam sidang (G. Moedjanto, 1993:63). Petisi yang diajukan Soetardjo Kartohadikusumo atas nama Volksraad tersebut ditolak dengan alasan bahwa tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik bangsa Indonesia masih belum memadai untuk menjalankan pemerintahan sendiri (Anhar Gonggong, 1985:45).

Kegagalan petisi Soetardjo mendorong Moh. Hoesni Thamrin sebagai ketua dari PARINDRA untuk menggalang badan Konsentrasi Nasional. Gagasan tersebut dikemukakannya dalam rapat pengurus besar PARINDRA pada tanggal 19 Maret 1939 (Slamet Mulyana, 1986:64). Kemudian Moh. Hoesni Thamrin mengadakan pendekatan dan perundingan dengan partai-partai politik dan organisasi-organisasi pergerakan seperti PSII, GERINDO, PII, Pasundan, Persatuan Minahasa, Partai Katholik untuk membicarakan masa depan bangsa Indonesia. Pada tanggal 21 Mei 1939 dalam rapat pendirian Konsentrasi Nasional di Jakarta berhasil didirikan suatu organisasi yang merupakan kerja sama

partai-partai politik dan organisasi-organisasi yang diberi nama Gabungan Politik Indonesia (GAPI) (Marwati Djoened Poesponegerodan Nugroho Notosusanto, 1992:232). GAPI merupakan organisasi federasi yang cukup besar pada masa itu, bila dibandingkan dengan MIAI yang dibentuk pada tahun 1937 sebagai wadah federasi dari organisasi-organisasi golongan Islam, GAPI masih memiliki kelebihan, karena selain mampu menyatukan organisasi politik yang bersifat sekuler, GAPI juga mampu menyatukan organisasi-organisasi dari kalangan agama. Sedangkan MIAI merupakan federasi dari golongan Islam saja (G. Moedjanto, 1993:62).

Pimpinan dalam struktur organisasi GAPI dipegang oleh satu sekretariat tetap yang juga merupakan pimpinan harian, yang pertama duduk dalam kepengurusan adalah Abikusno Tjokrosuyoso dari PSII sebagai penulis umum, Moh. Hoesni Thamrin dari PARINDRA sebagai bendahara dan Amir Syarifuddin dari GERINDO sebagai pembantu penulis (Tim Wartawan Kompas, 1980:42). Di dalam anggaran dasarnya perjuangan GAPI berdasarkan asas-asas, (1) hak menentukan nasib sendiri, (2) persatuan dan kesatuan nasional, serta (3) pengembangan demokrasi dalam bidang politik, sosial dan ekonomi (Sartono Kartocirdjo, 1993:187).

Tujuan utama GAPI yang ingin dicapai adalah untuk mempersatukan semua organisasi-organisasi dan partai-partai politik dalam rangka menuntut adanya pembentukan parlemen yang demokratis dan bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia (George Mc. Turnan Kahin, 1980:124). Tujuan tersebut dilakukan dengan kegiatan awal mengadakan gerakan untuk menuntut Indonesia Berparlemen kepada pemerintah kolonial Belanda.

2.2 Peranan GAPI Dalam Pergerakan Nasional Indonesia

Peranan GAPI dalam pergerakan nasional Indonesia terlihat dari kegiatan GAPI dalam menuntut Indonesia berparlemen dalam rangka pergerakan nasional Indonesia.

2.2.1 Activitas GAPI Dalam Menuntut Indonesia Berparlemen

Dewan Rakyat yang pada saat itu dikatakan sebagai parlemen, bukanlah suatu lembaga perwakilan yang sempurna, karena pembagian jatah kursi menurut jumlah suara tidak terdapat didalamnya. Yang ada dalam Dewan Rakyat hanyalah mencerminkan adanya ketentuan yang tegas mengenai pembagian jatah kursi tidak berdasarkan pada jumlah suara yang telah ditentukan oleh pemerintah kolonial (A.R. Hadjat, 1950:64). Dewan Rakyat seharusnya merupakan suatu lembaga yang mewakili rakyat, tetapi cara-cara yang dilakukan dalam pemilihan anggotanya dilakukan dengan tidak langsung, artinya bahwa rakyat tidak mempunyai hak untuk memilih dan menempatkan wakilnya dalam Dewan Rakyat berdasarkan keinginannya (Koentjoro Purbopranoto, 1938:11). Dengan melihat kondisi yang seperti itu, langkah GAPI untuk memperjuangkan adanya parlemen yang lebih demokratis bagi bangsa Indonesia merupakan suatu hal yang wajar.

Konferensi pertama GAPI pada tanggal 4 juli 1939 membahas mengenai gerakan yang akan diperjuangkan oleh GAPI. Gerakan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh GAPI yang kemudian terkenal dengan semboyan "Indonesia Berparlemen," jelas tidak menginginkan kemerdekaan penuh, melainkan suatu parlemen bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan pada sendi-sendi demokrasi. Sebelum gerakan GAPI dilancarkan secara besar-besaran, meletuslah Perang Dunia II, sehingga pada tanggal 20 September 1939 GAPI mengeluarkan suatu pernyataan yang kemudian dikenal dengan manifest GAPI. Isinya GAPI mengajak rakyat Indonesia dan negeri Belanda untuk bekerja sama menghadapi Fasisme. Kerjasama itu akan lebih berhasil apabila rakyat Indonesia diberi hak-hak baru dalam urusan pemerintahan (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1992:231-232).

Sementara itu, ditengah GAPI mengadakan gerakan menuntut "Indonesia Berparlemen" muncul kelompok lain yang berusaha membentuk badan persatuan yang diprakarsai oleh Moh. Yamin. Kelompok tersebut merasakan, bahwa perkembangan politik di dalam Dewan Rakyat kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan daerah-daerah luar pulau Jawa, maka untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan daerah luar pulau Jawa itu dibentuk

badan yang diberi nama Gabungan Nasional Indonesia (GNI) pada tanggal 10 Juli 1939 (Sartono Kartodirdjo, 1993:187).

Dalam rangka memperjuangkan gerakan GAPI GAPI, maka yang dilakukan adalah dengan menggarapkan adanya dukungan baik dari organisasi sosial maupun dari organisasi politik di Indonesia. GAPI harus membuktikan bahwa keinginan berparlemen bukan semata-mata keinginan GAPI saja, melainkan keinginan segenap rakyat Indonesia dan gagasan itu perlu disebarluaskan kepada rakyat, hal ini dilakukan GAPI agar nantinya dapat mengetahui tanggapan rakyat. Jika gerakan GAPI mendapat sambutan yang baik dari rakyat maupun dari partai-partai politik Indonesia, maka gagasan Indonesia Berparlemen akan menjadi kehendak seluruh rakyat Indonesia (Slamet Mulyana, 1986:58).

Meskipun ada tekanan dari pemerintah kolonial Belanda terhadap GAPI, tapi kegiatan atau gerakan untuk menuntut "Indonesia Berparlemen" terus dilakukan. Bahkan dalam konferensinya tanggal 4 Oktober 1939 GAPI memasang bendera merah putih dan menyiapkan pengawal berseragam, konferensi itu makin kuat kedudukannya karena dihadiri berbagai lapisan masyarakat, organisasi-organisasi dan partai-partai politik. Dari sikap kolektif dan sambutan-sambutannya menunjukkan dukungan kepada gerakan GAPI. Buruh, wanita, pemuda, Persatuan Islam, dan wakil-wakil daerah berpadu dengan organisasi-organisasi yang tergabung dalam GAPI. Tokoh nasionalis yang berbicara dalam konferensi itu adalah Kasimo dari Partai Katolik, Otto Iskandar Dinata, Sukiman, dan Aruji Kartawinata, sedangkan Hindromartono mewakili PVEN yang sebelumnya menolak bergabung dalam GAPI, dalam konferensi tersebut menyatakan dukungannya terhadap kegiatan yang dilakukan GAPI (Suhartono, 1994:117).

Dukungan-dukungan terhadap gerakan GAPI untuk menuntut "Indonesia Berparlemen" bermunculan dimana-mana, salah satunya rapat-rapat yang diadakan PSII, rapat dengan penuh gelora, penuh hiasan merah putih dan semangat mendukung gerakan GAPI, kegiatan tersebut dipelopori oleh Tjokrcaminoto. Sedangkan Abikusno menganjurkan agar diadakan pembacaan

dan di masjid-masjid guna mendukung gerakan "Indonesia Berparlemen." Kegiatan ini merupakan mobilisasi rohani yang dilakukan PSII dalam rangka mendukung kegiatan GAPI (Ongbckham,1989:132).

Sebagai perwujudan dari gerakannya, GAPI sendiri juga mengadakan rapat-rapat umum yang mencapai puncaknya pada tanggal 12 Desember 1939, dimana tidak kurang dari seratus tempat di Indonesia mengadakan rapat mempropagandakan tujuan GAPI yang seakan-akan udara Indonesia gemuruh dengan seruan "Indonesia Berparlemen" (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto,1992:232).

Pada tanggal 17 Desember 1939 GAPI menyerukan agar tuntutan "Indonesia Berparlemen" dijadikan gerakan umum yang harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Seruan tersebut diterangkan dalam keputusan GAPI bahwa segenap pengurus besar dari partai yang tergabung dalam GAPI memberikan instruksi pada cabang-cabangnya untuk melaksanakan gerakan umum GAPI. Apabila dalam suatu daerah tidak ada cabang dari partai-partai yang tergabung dalam GAPI maka togoan rakyat yang sadar akan perjuangan GAPI diharapkan memberikan dukungannya (Nugroho Notokusanto,1971:158).

Peranan GAPI dalam pergerakan nasional Indonesia juga nampak dalam aktivitasnya dalam membentuk Kongres Rakyat Indonesia (KRI) dan Majelis Rakyat Indonesia (MRI).

2.2.2 Aktivitas GAPI Dalam Pergerakan Nasional Indonesia

Aktivitas GAPI dalam pergerakan nasional Indonesia terlihat dengan keberhasilannya membentuk Kongres Rakyat Indonesia (KRI) dalam konferensi GAPI tanggal 23-25 Desember 1939 yang diselenggarakan di gedung Permufakatan Indonesia di Jakarta. Dalam konferensi tersebut dihadiri kurang lebih 99 organisasi sosial dan organisasi politik, diantaranya adalah Persatuan Journalistik Indonesia, Gerindo, Parindra, Istri Indonesia, dan Paguyuban Pasundan (Sri Sutjatningsih,1983:42). Dalam konferensi GAPI tersebut, selain membentuk KRI juga menghasilkan beberapa keputusan, antara lain : (1) KRI menjadi suksesor badan yang tetap sejak tanggal 24 Desember 1939, (2) langkah pertama untuk

mencapai tujuan perwujudannya parlemen Indonesia, (3) yang menjadi anggota KRI adalah organisasi-organisasi dan partai-partai yang cukup penting dan sebagai pekerjaannya di tunjuk oleh GAPI, (4) kegiatan untuk mencapai Indonesia berparlemen tersebut diteruskan dengan pimpinan GAPI, (5) "Merah Putih" diakui sebagai bendera persatuan, "Indonesia Raya" sebagai lagu persatuan, dan "Bahasa Indonesia" sebagai bahasa persatuan (A.K. Pringgodigdo, 1994:164).

Pada bulan Agustus 1940 waktu Negeri Belanda telah dikuasai Jerman dan Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat perang, GAPI kembali mengeluarkan resolusi yang menuntut diadakannya perubahan ketatanegaraan di Indonesia. Isi resolusi yaitu; (1) menuntut agar Volksraad diganti dengan parlemen yang sejati yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat, dan (2) merubah fungsi kepala-kepala departemen menjadi menteri yang bertanggung jawab pada parlemen yang dipilih oleh rakyat tersebut. Resolusi ini dikirimkan kepada Gubernur Jenderal, Volksraad, Ratu Wilhelmina, dan kabinet Belanda di London (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1992:233). Pemerintah kolonial tidak memberikan tanggapan yang serius terhadap keinginan GAPI. Pemerintah hanya bersedia memberikan dan menyetujui adanya perubahan ketatanegaraan apabila perang sudah selesai, karena itu pemerintah kemudian membentuk panitia Visman untuk meninjau tentang pemberian hak-hak politik yang lebih luas bagi bangsa Indonesia (Suhartono, 1994:96). Panitia Visman tersebut diketuai oleh Dr. F.H. Visman, sedangkan anggotanya meliputi; K.L.J. Enthoven, T.S.G. Moelia, Ong Swan Youe, R.A.A. Soejono, R. Soepomo, W.F. Wertheim, P. Eijssen, dan R.M. Abdul Gaffar Pringgodigdo sebagai sekretaris (Deliar Noer, 1982:233). Tetapi pemerintah tetap mengawasi aktivitas GAPI dan gerak-gerik anggota GAPI diantaranya adalah PARINDRA, GERINDO dan PSIL. GAPI tetap melanjutkan perjuangannya, hal ini terlihat dari adanya kerja sama dalam keanggotaan organisasi GAPI dengan tujuan agar tetap ada persatuan dan kesatuan yang kuat dalam perjuangan mencapai "Indonesia Berparlemen" (Iwa Kusuma Sumantri, 1963:74).

Tanggapan mengenai tuntutan GAPI "Indonesia Berparlemen" tidak saja dari pemerintah kolonial, tokoh Max Vaan Rool seorang anggota Partai Katholik

Roma yang baru kembali dari kunjungannya di Indonesia, memberikan tanggapan serta menegaskan ketidak percayannya terhadap kemampuan bangsa Indonesia untuk memegang dan melaksanakan pemerintahan sendiri. Ia memperkuat keyakinannya tersebut, bahwa rakyat Indonesia masih terbelakang dan terpecah-pecah. Ia menegaskan pula bahwa apabila pemerintah kolonial Belanda menyetujui usul GAPI itu, berarti pemerintah kolonial terlalu jauh memberikan hak-hak politiknya (A.R. Hadjot, 1950:53).

Meskipun pemerintah bersikap dingin sekali terhadap keinginan GAPI, akan tetapi GAPI terus menjalankan aksinya tentang pembentukan Indonesia berparlemen. Pada tanggal 10 Desember 1940, GAPI mengadakan konferensi, keputusannya, GAPI akan menjelaskan lebih jauh tentang keinginan-keinginannya dalam hal pembentukan parlemen di Indonesia. Keputusan tersebut sedapat mungkin disiarkan kepada rakyat dan dipropagandakan oleh semua Komite Indonesia Berparlemen yang telah didirikan diseluruh Indonesia. Pekerjaan membuat rancangan bentuk parlemen yang diinginkan oleh GAPI itu diserahkan kepada sekretariat GAPI, anggotanya terdiri dari Abikusno dari PSII sebagai penulis umum, A.K. Gani dari GERINDO sebagai penulis kedua dan Soekardjo Wirjopranoto sebagai bendahara, dibantu oleh Dr. Ratulangi dari Perserikatan Minahasa, Mr. Sartono dari GERINDO, dan Moh. Hoesni Thamrin dari PARINDRA. Rancangan tersebut akan dikemukakan nanti dalam konferensi GAPI yang diadakan pada bulan Januari 1941 di Jakarta. Hal itu dilakukan agar mendapatkan persetujuan dari anggota-anggota GAPI (A.K. Pringgodigdo, 1994 : 165). Rancangan struktur kotatanegaraan yang dibuat oleh GAPI itu pada pokoknya berdasarkan pada sistem pemerintahan demokrasi parlementer, dimana Negeri Belanda dan Indonesia merupakan suatu perserikatan negara dibawah pimpinan kepala negara. Kepala negara dibantu oleh dewan penasehat yang berkuasa mengangkat dan memecat menteri-menteri dengan persetujuan parlemen. Parlemen terdiri dari dua kamar, kamar pertama terdiri dari anggota-anggota yang dipilih menurut aturan tertentu sedangkan kamar kedua anggota-anggotanya dipilih secara langsung (Sartono Kartodirdjo, 1993:194).

Sesuai dengan yang direncanakan, pada tanggal 31 Januari 1941 diadakan konferensi GAPI yang berhasil menetapkan bentuk dan susunan parlemen bagi bangsa Indonesia. Secara garis besar parlemen yang di maksudkan GAPI terdiri dari dua kamar, kamar pertama anggotanya dipilih menurut suatu cara yang akan ditentukan kemudian, sedangkan kamar kedua dipilih oleh rakyat (A.K. Pringgodigdo, 1994: 166).

Aktivitas GAPI dalam memperjuangkan adanya parlemen yang demokratis bagi bangsa Indonesia lebih ditingkatkan lagi dengan membentuk Majelis Rakyat Indonesia (MRI) sebagai pengganti dari KRI, yang pembentukannya dipelopori oleh GAPI, MIAI, dan PVPN. Pembentukan MRI ini dilakukan dalam suatu konferensi GAPI pada tanggal 14 September 1941 (Sri Sutjatiningih, 1983:46). Dewan pimpinan MRI terdiri dari GAPI yang diwakili oleh Abikusno Tjokresuyoso, Sukarjo Wirjopranoto, Otto Iskandar Dinata, Mr. Sartono dan Kasimo. Dari MIAI diwakili oleh Wahid Hasyim, Wondaniserio, Dr. Sukiman, K.H. Mas Mansur dan Umar Hubeisj. Serta dari PVPN diwakili oleh Suroso, Atik Suardi, Mr. Hendromartono, Rooslan Wongsokusumo dan Drijowongso. Tujuan MRI adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial rakyat Indonesia yang berdasarkan demokrasi (A.K. Pringgodigdo, 1994:168-169).

Setelah MRI terbentuk maka pada tanggal 16 Nopember 1941 mengadakan rapat dengan menghasilkan keputusan-keputusan antara lain; (1) menetapkan anggaran rumah tangga MRI, (2) mengangkat pengurus harian dewan pimpinan untuk waktu sampai berlangsungnya rapat besar MRI, (3) kedudukan dewan pimpinan untuk sementara ditempatkan di jalan Kramat 96 Jakarta, (4) rapat besar MRI yang pertama akan diadakan di Surakarta bulan Mei 1942, (5) Rapat dewan pimpinan yang akan datang akan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 20-21 Desember 1941 (Sri Sutjatiningih, 1983:47).

MRI dipandang sebagai bentuk organisasi federasi yang paling maju saat itu, karena didalamnya tergabung tidak hanya organisasi politik tetapi juga organisasi sosial dan keagamaan. Dalam pemilihan pengurus MRI terpilih Mr. Sartono sebagai ketuanya dan persiapan-persiapan kearah kongres MRI pada bulan Mei 1942 sudah dilakukan oleh pengurus baru tersebut

(Suhartono,1994:96). Mengingat situasi dunia pada saat itu yang sangat kritis, MRI mengambil sikap untuk bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. sikap tersebut menimbulkan perpecahan dalam tubuh MRI, karena kemudian PSI dibawah ketuanya Abikusno yang bersimpati terhadap Jepang menyatakan keluar dari GAPI dan sekaligus MRI.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pengertian Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian seorang peneliti harus menggunakan metode yang sesuai dengan bidang ilmunya, agar penelitian dapat dilaksanakan secara sistematis dan efisien. Sebelum memaparkan metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini, maka perlu membahas terlebih dahulu pengertian metode penelitian tersebut.

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang artinya jalan menuju sampai. Metode merupakan jalan, cara seseorang memperoleh pengetahuan (Helius Samsuddin, 1996:48). Sedangkan penelitian (*research*) oleh Sutrisno Hadi diartikan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah (1989:4).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai tujuan, yaitu memecahkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan atau teori yang dilakukan secara ilmiah.

Wizarno Surakhmad mengelompokkan metode penelitian menjadi tiga macam, yaitu: (1) metode penelitian historis, (2) metode penelitian eksperimen, (3) metode penelitian deskriptif (1990:29). Sedangkan menurut Mohammad Nazir, metode penelitian dapat digolongkan menjadi lima macam, yaitu: (1) metode penelitian sejarah, (2) metode penelitian deskriptif, (3) metode penelitian eksperimental, (4) metode *grounded research*, dan (5) metode penelitian tindakan (1988: 54).

Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan metode penelitian sejarah (*historical research methods*). Penggunaan metode penelitian sejarah ini terutama sekali didasarkan pada pertimbangan bahwa metode penelitian sejarah itulah yang paling sesuai dengan sifat masalah yang penulis laksanakan dalam penelitian ini.

Pada penelitian sejarah dikenal ada empat jenis penelitian, yaitu : (1) penelitian sejarah komparatif, (2) penelitian yuridis atau legal, (3) penelitian biografi, dan (4) penelitian bibliografis (Moh. Nazir, 1995: 61-62). Penelitian yang penulis lakukan ini apabila dilihat dari sumber datanya, maka termasuk penelitian bibliografis. Penelitian bibliografis ini oleh Hadari Nawawi disebut juga penelitian kepustakaan, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data-data dari berbagai literatur baik yang ada di perpustakaan-perpustakaan maupun ditempat-tempat lain (1991:30). Oleh karena itu penelitian ini sering juga disebut studi literatur.

3.2 Pengertian Metode Penelitian Sejarah

Metode penelitian sejarah adalah proses menguji serta menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Helius Sjamsuddin, 1996:19). Menurut Gilbert J. Gerraghan yang dikutip oleh Nugroho Notosusanto, pengertian metode sejarah adalah sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi penyusunan ceritera sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesis dari hasil-hasilnya (1971: 10-11). Louis Gottschalk mendefinisikan metode penelitian sejarah sebagai suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (1975:32).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa pengertian metode penelitian sejarah adalah suatu proses yang harus dilaksanakan oleh sejarawan dalam mencari sumber, menilai secara kritis, menginterpretasikan yang selanjutnya menuangkan ke dalam bentuk tulisan sehingga menjadi kisah sejarah yang kronologis, sistematis dan logis.

Langkah-langkah penelitian sejarah menurut Louis Gottschalk yang dikutip Nugroho Notosusanto di bagi menjadi empat langkah, yaitu : (1) heuristik, (2) kritik, (3) interpretasi, dan (4) historiografi (1971:17).

3.2.1 Heuristik

Heuristik merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti sejarah dalam menyusun cerita sejarah. Kata heuristik berasal dari kata Yunani *heuriskein* yang berarti menemukan (Nugroho Notosusanto, 1971:18). Dalam hal ini maksudnya adalah menemukan sumber-sumber yang disebut sebagai jejak-jejak sejarah. Senada dengan pendapat tersebut IG. Widja mengatakan, bahwa heuristik adalah mencari atau menemukan sumber-sumber sejarah sebagai bahan guna penyusunan kisah atau ceritera sejarah (1988:19).

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan, bahwa heuristik adalah langkah pertama dalam penelitian sejarah yang merupakan suatu proses mencari untuk menemukan sumber-sumber sejarah. Dalam penelitian ini, dengan langkah heuristik dapatlah dikumpulkan buku-buku sebagai sumber penyusunan skripsi ini, yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu : (1) buku-buku pokok, yang di dalam daftar kepustakaan skripsi ini diberi kode *), (2) buku-buku penunjang.

3.2.2 Kritik

Bila seorang peneliti sejarah sudah berhasil mengumpulkan jejak-jejak sejarah sebagai sumber cerita sejarah, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang peneliti sejarah adalah melakukan kegiatan kritik. Kritik adalah kegiatan menilai, menguji atau menyeleksi jejak-jejak (sumber-sumber) yang benar, dalam arti benar-benar diperlukan, asli dan mengandung informasi yang relevan dengan cerita sejarah yang akan disusun (IG. Widja, 1988:21). Nugroho Notosusanto berpendapat, bahwa kritik dimaksudkan untuk mendapatkan sumber-sumber sejarah yang valid dan reliabel, karena sumber tersebut masih berupa bahan mentah belaka yang harus disusun menjadi fakta sejarah (1971:41).

Dalam hal kritik sumber terbagi menjadi dua tahap, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern bertujuan untuk menilai atau *autencity* suatu sumber dengan mempertanyakan apakah sumber itu asli atau tidak (Nugroho Notosusanto, 1971: 20).

Sedangkan kritik intern dilakukan setelah melakukan kritik ekstern. Kritik intern bertujuan untuk meneliti kebenaran isi sumber (Winarno Surakhnad, 1990:135). Kritik intern bertalian dengan apakah sumber itu dapat memberikan informasi yang kita butuhkan, dan harus dapat membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan oleh sumber itu dapat dipercaya, yang dapat diperoleh dengan menilai secara kritis terhadap sumber dengan membanding-bandingkan kesaksian dari berbagai sumber lain.

3.2.3 Interpretasi

Langkah ketiga dalam metode sejarah adalah interpretasi atau penafsiran. Interpretasi adalah menetapkan makna yang saling berhubungan antara fakta-fakta yang telah terkumpul (Nugroho Notosusanto, 1971:17). Fakta-fakta sejarah itu perlu dihubungkan dan dikait-kaitkan satu dengan yang lain sehingga merupakan suatu rangkaian yang masuk akal dan menunjukkan kesesuaian satu dengan yang lainnya (IG. Widja, 1988:23). Dengan pengertian bahwa rangkaian fakta-fakta itu harus menunjukkan rangkaian yang bermakna dari berbagai data, peristiwa dan gagasan yang tertulis di masa lampau dalam arti tersusun secara sistematis, kronologis dan logis. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa interpretasi adalah sebagai aktivitas merangkai dan menghubungkan atau mengkaitkan fakta-fakta seobyektif mungkin, sehingga dapat mengungkapkan peristiwa masa lampau secara faktual, rasional, dan kronologis.

3.2.4 Historiografi

Historiografi merupakan kegiatan terakhir dari langkah penelitian sejarah. Historiografi merupakan kegiatan merekonstruksi secara imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh (Louis Gottschalk, 1975:32). Proses ini memerlukan kreativitas mutu imajinatif dan penulisan yang hendaknya obyektif atau dengan kata lain penyampaian hasil rekonstruksi imajinasi yang ilmiah yakni dengan penulisan fakta-fakta sejarah menjadi kisah sejarah yang selurus.

Metode penyajian (historiografi) yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan obyek penelitian apa adanya (Hadari Nawawi, 1991:63). Metode Deskriptif dalam pelaksanaannya tidak hanya mengumpulkan dan menyusun data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi data dengan membandingkan persamaan dan perbedaan dari fenomena (keadaan) tertentu (Winarno Surakhmad, 1990:139). Jadi historiografi dengan metode deskriptif berusaha melukiskan peristiwa sejarah secara kronologis, logis dan sistematis dengan merangkaikan fakta-fakta sejarah sesuai dengan kondisi secara imajinatif yang obyektif dan bertanggung jawab.

Untuk melukiskan peristiwa sejarah secara kronologis, logis, dan sistematis sesuai dengan kondisi yang terjadi dalam peristiwa yang diteliti, maka imajinasi penulis memegang peranan penting dalam menghubungkan fakta sejarah yang satu dengan fakta sejarah lainnya secara harmonis, sehingga akan tercipta kisah sejarah yang ilmiah.

3.3 Metode Penentuan Tempat Penelitian

Dilihat dari wujudnya, sumber-sumber sejarah dibagi menjadi tiga macam, yaitu: (1) sumber benda (bangunan, perkakas dan senjata), (2) sumber tertulis (dokumen), dan (3) sumber lisan (hasil wawancara) (Nugroho Notosusanto, 1971:18). Buku-buku termasuk dalam sumber tertulis dan digolongkan ke dalam dokumen dokumen yang dapat diperoleh di perpustakaan. Dengan demikian sifat penelitian seperti yang penulis lakukan ini adalah studi kepustakaan atau penelitian bibliografis/studi dokumenter.

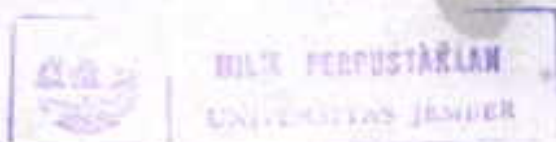
Studi kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun data-data dari berbagai bacaan atau literatur yang ada di perpustakaan (Hadari Nawawi, 1991:39). Hal ini sesuai dengan pendapat Kartini Kartono yang mengatakan, bahwa studi kepustakaan dilakukan di perpustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data/ informasi dengan bantuan bermacam-macam bahan yang terdapat di perpustakaan berupa naskah, majalah, dan catatan-catatan lain (1990:33).

Jadi kegiatan mengumpulkan data lebih banyak dilakukan di perpustakaan meskipun tidak menutup kemungkinan dilakukan di tempat lain.

Metode yang penulis gunakan dalam memilih dan menentukan perpustakaan yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Purposive Sampling. Menurut Sutrisno Hadi, penggunaan metode Purposive Sampling berlandaskan pada pemilihan sekelompok subyek (populasi) yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (1989: 82). Secara etimologi, purposive berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti sengaja atau tujuan. Bertolak dari pendapat dan keterangan di atas, maka penentuan tempat penelitian ini memang ditentukan secara sengaja dengan alasan dan pertimbangan bahwa penulis telah biasa masuk dan menggunakan perpustakaan tersebut, sehingga penulis tahu buku-buku sumber yang diperlukan dalam penelitian ini yang menurut penulis tersedia di perpustakaan yang penulis pilih.

Cara kerja untuk menentukan tempat penelitian ini, yaitu dengan melihat perpustakaan-perpustakaan yang ada di Jember sebagai populasinya yang meliputi : (1) UPT Perpustakaan - Universitas Jember, (2) Perpustakaan Program Pendidikan Sejarah FKIP-Universitas Jember, (3) Koleksi Pustaka Jurusan Sejarah Fakultas Sastra - Universitas Jember, (4) Perpustakaan FISIP - Universitas Jember dan sebagainya. Dalam mengambil sampel perpustakaan-perpustakaan yang penulis gunakan tersebut, penulis mendasarkan diri pada ciri-ciri atau keadaan dari perpustakaan-perpustakaan yang ada secara keseluruhan, kemudian secara sengaja dan intensional menetapkan perpustakaan-perpustakaan tertentu yang penulis ketahui betul kondisinya dan menyediakan buku-buku yang penulis gunakan untuk memperoleh data guna memecahkan permasalahan yang penulis ajukan.

Dengan metode purposive sampling tersebut, maka perpustakaan yang penulis pilih sebagai tempat penelitian, yaitu: (1) UPT Perpustakaan - Universitas Jember, (2) Perpustakaan Program Pendidikan Sejarah FKIP-Universitas Jember, ditambah juga dengan buku-buku koleksi pribadi sebagai pelengkap.



3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan kunci dalam proses pelaksanaan penelitian. Mengingat penelitian yang penulis lakukan bersifat studi kepustakaan, maka metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah metode dokumenter. Menurut Hadari Nawawi, yang dimaksud dengan metode dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan-peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip tentang pendapat-pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian (1991:133). Metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah metode dokumenter. Artinya, sumber datanya berupa dokumen, yaitu buku-buku dan sumber-sumber tertulis lainnya. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode dokumenter adalah metode pengumpulan data dengan sumber-sumber tertulis berupa buku-buku, memuat hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan intensitasnya, sumber-sumber data penelitian ini adalah sumber pokok dan sumber penunjang. Sumber pokok adalah sumber yang paling banyak dipakai sebagai acuan dalam penelitian, sedangkan sumber penunjang adalah sumber yang berfungsi melengkapi sumber-sumber pokok.

3.5 Metode Analisis Data

Setelah berhasil mengumpulkan data, maka langkah berikutnya adalah mengadakan analisis data, yaitu melakukan aktifitas kritik dan interpretasi. Berkaitan dengan penggunaan metode sejarah sebagai alat bantu untuk merekonstruksi masa lampau secara ilmiah, diperlukan kemampuan berfikir logis dan imajinatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode filosofik.

Metode filosofik adalah prosedur pemecahan permasalahan melalui perenungan atau pemikiran yang terarah, mendalam dan menasar tentang hakikat sesuatu, baik menggunakan pola berpikir aliran filsafat tertentu, maupun dalam bentuk analisis sistematis berdasarkan pola berpikir induktif, deduktif, fenomenologis, dan lain-lain.

(Hadari Nawawi, 1991:62). Metode filosofik ini sesuai sekali dipakai dalam penelitian sejarah sebab tidak tepat bila sejarah hanya semata-mata bertujuan untuk menciptakan suatu cerita, tetapi yang lebih pokok adalah membuat uraian yang memaknai penalaran logis, kritis, dan mendalam (Sartono Kartodirdjo, 1992:23).

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa metode filosofik adalah cara yang digunakan dengan berpikir yang teratur menurut urutan yang tepat sehingga menghasilkan pengetahuan yang sistematis, mendekati kebenaran, dan masuk akal. Dalam menerapkan metode filosofik tersebut penulis menggunakan teknik logika induktif dan teknik logika komparatif, yang penggunaannya dilakukan secara simultan (bersama-sama), tidak secara sendir-sendiri, dengan langkah kritik dan interpretasi.

3.5.1. Teknik Logika Induktif

Teknik logika induktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus/tertentu atau fakta-fakta yang bersifat individual, untuk sampai pada kesimpulan yang bersifat umum (Hadar. Nawawi, 1991: 18). Pendapat di atas di dukung oleh Sutrisno Hadi yang mendefinisikan teknik logika induktif sebagai cara berpikir yang berlandaskan pada pengetahuan-pengetahuan khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian dari faktor-faktor yang khusus dan kongkret itu dapat ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum (1989:42). Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa logika induktif adalah cara berpikir dari pengetahuan atau informasi yang bersifat khusus untuk disimpulkan menjadi fakta yang bersifat umum dan obyektif.

3.5.2. Teknik Logika Komparatif

Teknik logika komparatif adalah cara yang digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan berbagai fenomena untuk mencari faktor apa dan situasi bagaimana yang menyebabkan timbulnya suatu peristiwa (Mohammad Ali, 1986: 123). Menurut Winarno Surakhmad, studi komparatif digunakan dalam suatu penelitian untuk meneliti hubungan lebih dari satu fenomena yang sejenis dengan menunjukkan unsur-

unsur persamaan dan perbedaan dari suatu peristiwa (1990:136). Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa teknik logika komparatif adalah proses membanding-bandingkan data yang satu dengan yang lain untuk melakiskan fakta atau peristiwa sejarah untuk dirangkaikan menjadi kisah sejarah yang masuk akal, sistematis, dan obyektif.

Sesudah data-data yang dianalisis dengan metode filosofik secara teknik induktif dan komparatif tersebut diatas, berhasilah dirumuskan fakta-fakta sejarah. Fakta-fakta itu sesudah terkumpul semua, lalu disusun secara kronologis dan sistematis, dirangkaikan secara imajinatif menjadi ceritera sejarah yang diinginkan. Menyusun ceritera sejarah dari data-data menjadi fakta-fakta dan kemudian menjadi ceritera sejarah yang kronologis, sistematis, dan logis serta imajinatif itulah yang disebut historiografi/penulisan sejarah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan permasalahan pada bab I dan pembahasan pada bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa peranan GAPI dalam pergerakan nasional Indonesia dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas GAPI, yaitu:

1. aktivitas GAPI dalam menuntut Indonesia berparlemen
2. aktivitas GAPI dalam pergerakan nasional Indonesia dalam membentuk Kongres Rakyat Indonesia (KRI) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia; dan merubah Kongres Rakyat Indonesia (KRI) menjadi Majelis Rakyat Indonesia (MRI) sebagai badan untuk mengimbangi Dewan Rakyat.

Semua aktivitas GAPI itu memberikan semangat baru bagi pergerakan nasional Indonesia, walaupun bila dilihat secara keseluruhan belum berhasil mencapai cita-cita akhir pergerakan nasional Indonesia, yaitu Indonesia merdeka.

5.2 Saran-Saran

Bertitik tolak pada kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberi saran-saran, yaitu :

1. bagi mahasiswa calon guru sejarah, hendaknya lebih banyak membaca literatur tentang Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, sehingga dapat menambah wawasan dan memperdalam penguasaan materi;
2. bagi generasi muda, belajar sejarah adalah sangat penting bagi kaum muda karena masa depan bangsa terletak pada generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa. Dengan mengerti sejarah Pergerakan nasional Indonesia, khususnya peranan GAPI dalam pergerakan nasional Indonesia maka akan terbentuk

semangat nasionalisme generasi muda dan memberikan semangat persatuan dan kesatuan dalam menelaah kepentingan bangsa dan negara;

3. bagi almamater, hendaknya menambah literatur-literatur yang berkaitan dengan Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, untuk memperkaya kepustakaan hasil penelitian dari ahli-ahli sendiri maupun ahli-ahli asing, demi pengembangan ilmu sejarah nasional.



KEPUSTAKAAN

- Abeyasakere, Susan, 1985, Kegiatan Politik Nasionalis Tahun 1930 an, dalam Colind Wild dan Peter Cary (Red), Gramedia, Jakarta.
- Adam Malik, 1982, Mengabdikan Republik Jilid I Adam Dari Andalas, Gunung Agung, Jakarta.
- Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo, 1978, Kesadaran Nasional Sebuah Otobiografi, Gunung Agung, Jakarta.
- A.K. Pringgodigdo, 1994, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta. *)
- Anhar Gonggong, 1985, M.H. Thamrin, Depdikbud – Direktorat Infentarisasi Dokumen Sejarah Nasional, Jakarta. *)
- A.R. Hadjat, 1950, Kenyataan Dalam Perhubungan Indonesia Belanda, Tjerdas, Medan. *)
- Cahyo Utomo, 1985, Dinamika Pergerakan Indonesia Dari Kehangsaan Hingga Kemerdekaan, IKIP Malang Press, Jakarta.
- Deliar Nuer, 1982, Gerakan Modern Islam 1900-1942, LPJES, Jakarta. *)
- Kahin, George Mc. Turnan, 1985, Nasionalisme Dan Revolusi Indonesia, terjemahan Nin Bakdi Sumanto, UNS Press, Surakarta. *)
- G. Moedjanto, 1993, Indonesia Abad ke- 20 Jilid 1, Kanisius, Yogyakarta. *)
- Gottschalk, Louis, 1975, Mengerti Sejarah, terjemahan Nugroho Notosusanto, Yayasan Penerbit UI, Jakarta.
- Hadari Nawawi, 1991, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Helius Sjamsuddin, 1996, Metodologi Sejarah, Depdikbud – Dirjen Dikti, Jakarta.
- Hugo F. Reading, 1986, Kamus Ilmu Ilmu Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- I.G. Widja, 1988, Pengantar Ilmu Sejarah Dalam Perspektif Pendidikan, Satya Wacana, Semarang.
- Iwa Kusuma Sumantri, 1963, Sejarah Revolusi Indonesia Jilid 1 Masa Perjuangan Sebagai Perintis Revolusi, Grafiti Press, Jakarta. *)
- Kartini Kartono, 1990, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Mandar Maju, Bandung.
- Koentjoro Purbopranoto, 1938, Dewan Rakvat, Balai Pustaka, Batavia. *)
- Koentjaraningrat (Red'), 1991, Metode Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta.
- Koch, D. M. G, 1951, Menuju Kemerdekaan Indonesia, terjemahan Abdul Muhs, Yayasan Pembangunan, Jakarta.
- Lukman Ali dkk, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.
- Nugroho Notosusanto, 1971, Iktisar Sejarah Pergerakan Nasional 1908-1942, Pusat Sejarah ABRI - Departemen Hankam, Jakarta. *)
- , 1971, Norma-norma Dasar Penelitian Dan Penulisan Sejarah, Departemen Pertahanan dan Keamanan - Pusat sejarah ABRI, Jakarta.
- Mahmud Junus, 1996, Tarjamah Al Quran Al Karim, P.T. Al-Ma'arif, Bandung.
- Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, 1992, Sejarah Nasional Indonesia V, Balai Pustaka, Jakarta. *)
- Mohammad Ali, 1986, Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi, Angkasa, Bandung.
- Moh. Nazir, 1988, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mohammad Sidky Daeng Materu, 1985, Sejarah Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia, Gunung Agung, Jakarta.
- Onghokham, 1989, Runtuhnya Hindia Belanda, Gramedia, Jakarta. *)

- P.M. Pasaribu, 1960, Encyclopaedia Politica, Tinta Mas, Jakarta.
- Ricklefs, M.C. 1998, Sejarah Indonesia Modern, terjemahan Dharmono Hardjowidjono, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- R.Z. Leireissa, 1985, Terwujudnya Suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia 1900 Sampai 1950, LPJES, Jakarta.
- Sartono Kartodirdjo, 1990, Pengantar Sejarah Indonesia Baru Sejarah Pergerakan Nasional Jilid 2 Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme, Gramedia, Jakarta. *)
- Setiadi Kartohadi kusumo, 1990, Soetardjo Pembuat Petisi Petisi Soetardjo Dan Perjuangannya, Sinar Harapan, Jakarta. *)
- Slamet Mulyana, 1986, Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan, Inti Idayu Pres, Jakarta. *)
- Sri Sutjatningsih, 1983, Otto Iskandar Dinata, Depdikbud - Direktorat Inventarisasi dan dokumen Sejarah Nasional, Jakarta. *)
- Suhartono, 1994, Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. *)
- Suharsimi Arikunto, 1991, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Bina Aksara, Jakarta.
- Susanto Tirtoprodjo, 1986, Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, P.T. Pembangunan, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1987, Metodologi Research I, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Tim Wartawan Kompas, 1980, I.J. Kasimo Hidup dan Perjuangannya, Gramedia, Jakarta. *)
- Winarno Surakmad, 1990, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Tarsito, Bandung.

Keterangan:

*) : Buku Pokok

Lampiran 1:

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel Penelitian	Jenis dan Sifat Penelitian	Permasalahan	Sumber Data	Metode Penelitian
<p>1 Peraturan Gabungan Politik Indonesia (GAP) dalam Pergerakan Nasional Indonesia</p>	<p>2 1. Peraturan Gabungan Politik Indonesia (GAP) 2. Pergerakan nasional Indonesia</p>	<p>3 Jenis: Penelitian historik Sifat: studi literatur</p>	<p>4 Bagaimana peranan GAP dalam pergerakan nasional Indonesia?</p>	<p>5 Buku pokok 17 buku, Buku penunjang 25 buku.</p>	<p>6 1. Metode penentuan tempat penelitian, purposive sampling 2. Metode pengumpulan data: dokumen 3. Metode analisis data: metode filosofik dengan teknik logika induktif dan logika komparatif</p>

UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kalimantan III/24 PO. BOX 108 Jember 68121

Telp. (0331) 83860, 88261 Fax. (0331) 88261

E-mail : lib-unej@indo.net.id

SURAT KETERANGAN STUDI LITERATUR

NOMOR : 233 / P 32 HUG / 12 n 199

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Jember, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : HARIYANTO
 NIM : 9402105299
 Jur/Program : ~~Pend. IPS~~ / ~~Pend. Sejarah~~
 Fakultas : KIP
 Angkatan : 1994

Terhitung mulai bulan Maret sampai bulan Juni 1999 telah mengadakan studi literatur di Perpustakaan Universitas Jember, dengan judul sebagai berikut :

Tanggal	Tempat			
	R. Sirkulasi	R. Referen	R. OR	R. Skripsi
10-3-1999	X			
23-3-1999	X			X
30-3-1999	X			
12-04-1999		X		
26-04-1999	X			
17-05-1999		X		
7-06-1999			X	
15-06-1999	X			

Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jember, 28 Juni 1999

Kepala
Kasubag. TU

Budiwati
 Dra. Budiwati, S.Sos.
 NIP. 130 683 181

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS.

1. Nama : Hariyanto
 2. Tempat/tanggal lahir : Jember, 28 September 1975
 3. Agama : Islam
 4. Nama Ayah : Suparno
 5. Nama Ibu : Suhaliyah
 6. Alamat
 - Asal : Rejosari RT.5 RW.X No.16 Gumelar Balung
 Jember
 - Di Jember : Rejosari RT.5 RW.X No.16 Gumelar Balung
 Jember

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Sekolah	Tempat	Tahun lulus
1	SD	SD N Gumelar III	1988
2	SMP	SMP N 2 Balung	1991
3	SMA	SMA N Rambipuji	1994

C. KEGIATAN ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Tempat	Tahun
1.	PRAMUKA	SMP N -2 Balung	1989 - 1991
2.	OSIS	SMP N -2 Balung	1990 - 1991
3.	PASKIBRAKA	SMA N Rambipuji	1992- 1993
4.	PRAMUKA	SMA N Rambipuji	1992 - 1994
5.	HMP Pond. Sojuardi	FKIP - UNEJ	1996 - 1997

DAFTAR RALAT

Nomor	Baris ke dari		Terketik	Seharusnya
	Halaman	Bawah		
1	2	3	4	5
17	20	12	Abikuso	Abikusno
26	4	24	fakor	faktor
36	16	17	organisasikan	organisasi